

Hukum dan HaM

Fahmi Arif Zakaria, SH., M.Pd., M.Hum



Perkembangan ide perlindungan dan perjuangan Hak Asasi Manusia

Menurut Megandaru W. Kamuryan, penegasan tentang pengakuan adanya “enam dharma” dimaksudkan untuk menggambarkan keragaman agama-agama yang dianut oleh masyarakat Majapahit

Pertama, Dharmayaksa ring Kacewan (kasaiwan) yang khusus mengurus segala hal yang bersangkutan dengan agama siwa. Lembaga ini diberikan tugas untuk memberikan pengajaran keagamaan di bidang agama Hindu-Siwa dan menyelesaikan segala persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum dari agama tersebut.

Kedua, Dharmayaksa ring Kasogatan yang menangani segala hal berhubungan dengan agama Budha. Lembaga ini diberikan tugas untuk memberikan pengajaran keagamaan di bidang agama Budha dan menyelesaikan segala persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum dari agama Budha

Ketiga, Dharmyaksa ring Herahaji, yaitu suatu lembaga keagamaan milik para penganut agama-agama lokal. Lembaga ini juga lazim disebut dengan nama “Dharma Ipas Karsya n”. Lembaga keagamaan ini diamanahi tugas khusus dalam memberikan pengajaran keagamaan kepada para pemeluk agama-agama lokal yang masih dianut dan diyakini oleh masyarakat Majapahit, serta menyelesaikan segala permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku menurut agama-agama lokal tersebut.

Keempat, Raja Pandhita, yaitu suatu lembaga keagamaan yang dikhususkan untuk membina dan memberikan pengajaran terhadap para pemeluk agama Islam yang mulai bermunculan dan berkembang di Majapahit

Lembaga ini juga difungsikan sebagai lembaga penyelesaian segala persoalan hukum yang berkaitan dengan syariah Islam. Lembaga ini mulai didirikan sejak hadirnya masyarakat Muslim di tanah Jawa. Kehadiran lembaga ini menjadi bukti shahih atas komitmen dan tanggung-jawab Majapahit terhadap keberlangsungan agama-agama yang telah dijamin oleh negara dalam konstitusinya

Adanya empat macam lembaga keagamaan tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa Majapahit tidak hanya memberi kebebasan dalam menganut agama, tetapi juga memberikan pelayanan dan fasilitas keagamaan yang maksimal

demi keberlangsungan atau hidupnya ghiroh keagamaan. Selain itu, difasilitasinya

agama-agama lokal melalui lembaga keagamaan (Dharmayaksa ring Herahaji) menandakan bahwa Majapahit tidak pernah membeda-bedakan antara agama dan

kepercayaan (agama-agama lokal) yang dianut oleh rakyatnya. Bahkan kehadiran

agama Islam pun dianggap bukan sebagai ancaman bagi Majapahit, sehingga kehadiran agama baru ini tetap difasilitasi dengan baik dan maksimal layaknya

Menurut beberapa sumber titik awal munculnya pluralisme dan toleransi antar umat beragama di Majapahit yang menggambarkan kedudukan Raja Hayam Wuruk yang dalam menjalankan roda pemerintahannya didampingi oleh para pemuka agama berbeda, ada slogan berbunyi "*Sri nata mangadeg kapit Dahyang Acarya Ring Kosogatan lan Dahyang Acarya Ring Cyiwanata*". Kebijakan Hayam Wuruk yang menancapkan prinsip toleransi tersebut tidak lepas atas kesadaran pribadi Raja sebagai orang yang hidup dalam keluarga yang heterogen.

Perkembangan

Substansi HAM dibagi ke dalam 4 Generasi HAM, yaitu:

Generasi HAM I substansi tuntutan HAM nya adalah HAM Sipil dan Politik,

Generasi HAM II substansi tuntutan HAMnya adalah HAM Ekonomi, Sosial,

Generasi HAM III substansi tuntutan HAMnya adalah HAM Budaya dimana lahirnya PBB merupakan titik tonggak lahirnya Generasi HAM ini,

Sedangkan Generasi HAM IV substansi tuntutan HAMnya adalah HAK-Hak Solidaritas yaitu hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat

Sebait kata dari Indonesia

Ketika ada sekelompok negara kaya merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara yang semakin kentara ketika PBB tidak berdaya. Aksi-aksi kekerasan tanpa mandat PBB, seperti kita saksikan, telah menafikkan keberadaan badan dunia yang kita miliki bersama itu. Oleh karena itu kita bangsa-bangsa di Asia-Afrika mendesak reformasi PBB. Agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa.

Ketidakadilan global juga terasa ketika sekelompok dunia enggan mengakui realita dunia yang telah berubah. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang.

Terima
kasih

2021.10.21